

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Redi. 2017. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Aminuddin Ilmar. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Pangerang Moenta. 2017. *Permusyawaratan dan DPRD Analisis Aspek Hukum dan Produk Permusyawaratan*. Malang: Inteligencia Media.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ayu Widowati Johannes. 2020. *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah*. Bandung: CV Cendikia Press.
- Badri Khaeruman, et al. 2004. *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat*. Jakarta: PT. Nimas Ultima.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Hani Adhani. 2019. *Sengketa Pilkada Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Mira Buana Merdeka.
- Janedjri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Daerah Istimewa Yogyakarta : PT Kanisius.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Yusri, et al. 2019. *Pendidikan Politik Pemerintah Kontra Golput*. Medan: LPPI AQLI.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari. 2015. *Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna*. Jakarta: Bestari Buana Murni.
- Rumokoi dan Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suharizal. 2011. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

- Achmad Arifulloh. 2015. Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. Jurnal Pembaharuan Hukum. Volume II Nomor 2. Hukum UNISSULA. Semarang.
- Bungasan Hutapea. 2015. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Jurnal RechtsVinding. Volume 4 Nomor 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Cucu Sutrisno. 2017. Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 2 Nomor 2. Universitas Muhammadiyah. Ponorogo.
- Darmawan dan M. Fajrul Falah. 2022. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Volume 4 Nomor 2. UIN Sunan Ampel. Surabaya.

- Dewa Gede, Kadek Widya, dan Ratna Artha. 2019. Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. e-Journal Komunitas Yustisia. Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Diana Yusyanti. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi dalam Otonomi Daerah. Jurnal RechtsVinding. Volume 4 Nomor 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Jakarta.
- Eko Noer Kristiyanto. 2017. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Volume 17 Nomor 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM KemenKuHam RI. Jakarta Selatan.
- Mokhamad Abdul Aziz. 2016. Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945. Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. Volume 1 Nomor 2. UNNES. Semarang.
- Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika. 2023. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah dalam Hukum Positif Indonesia. Jurnal Kertha Semaya. Volume 11 Nomor 6. Fakultas Hukum UPNV. Jawa Timur.
- Nurfaqih Irfani. 2020. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 16 Nomor 3. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta Selatan.
- Sayidatul Insiyah, *et al.* 2019. Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung oleh Rakyat. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum. Volume 28 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Slamet Suhartono. 2020. Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 15 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus. Surabaya.
- Syafuruddin dan Siti Hasanah. 2022. Analisis Dampak Penyelenggaraan

Pilkada Serentak Tahun 2024. Journal of Government and Politics (JGOP). Volume 4 Nomor 2. Fisipol UMM. Mataram.

Syamsul Anwar. 2016. Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih, Asy-Syir' ah. Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum. Volume 50 Nomor 2. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Zulfajri, H Jalil, Iskandar A. Gani. 2019. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan As, Belanda, dan India. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 21 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.

### **Skripsi**

Abdul Ghafur. 2022. *Kajian Yuridis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Jember.

Azkiya Namira Trivani. 2022. *Analisis Pertimbangan DPR Aceh Menolak Pilkada Serentak Tahun 2024*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Banda Aceh.

Basuki Kurniawan dan Nita Ryan. 2022. *Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi*. Jurnal Hukum Keluarga. Volume 14 Nomor 1. Fakultas Syariah IAIN. Mataram.

Bintang Garda Nusantara. 2022. *Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik di Parlemen)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Devi Layalin Rahmawati. 2021. *Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Maslahat*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Purwokerto.

Hefrian Fareza. 2021. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.

Meri Yandika. 2021. *Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry. Banda Aceh.

Muhammad Taufiqurahman, et al. 2020. *Rangkap Jabatan Kepala Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi. UNISKA. Kalimantan.

Nunung Puji Rahayu. 2023. *Harmonisasi Hukum Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020 (Studi Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 28 D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. UPNV. Jawa Timur.

Nurfadillah. 2022. *Analisis Kekalahan Pasangan Tomy Satria Yulianto dan Andi Makkasau di Pilkada 2020 Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan*. Skripsi. Sarjana Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.

Reza Efendi. 2022. *Pandangan Fiqih Siyasah tentang Peran Lembaga Adat dalam Pilkada (Studi Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan. Lampung.

Rizky Firmansyah Putra. 2018. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Masa Kampanye Pilkada Dihubungkan dengan Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung.

## **Makalah**

Sayid Hafiz Parlindungan Manurung. 2020. *Kelebihan dan Kekurangan Antar Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dengan Pilkada Langsung*. Makalah. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## **Internet**

Abi Sarwanto. 2021. *Pro Kontra RUU Pemilu dan Polemik Pilkada Serentak 2024*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128080822-322/pro-kontra-ruu-pemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024>. Pada tanggal 21 Juni 2023, pukul 21.17 Wita.

Advokat Konstitusi. 2021. *Memecahkan Konflik Norma dengan Asas Derogasi*. Diakses dari <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/3/>. Pada tanggal 9 September 2023, pukul 4. 26 Wita.

Anonim. 2018. *Pilkada Serentak dan Tantangan Demokrasi Subtansial*.

Diakses dari <https://iain-surakarta.ac.id/pilkada-serentak-dan-tantangan-demokrasi-substansial/>. Pada tanggal 18 Juli 2023, pukul 16:48 Wita.

Franz Magnis Suseno. 2019. *Golput*. Diakses <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/03/12/golput-5>. Pada tanggal 11 Februari 2024, pukul 00.06 Wita.

Haryanti Puspasari dan Kristian Erdianto. 2021. *Sikap Fraksi di DPR Soal Revisi UU Pemilu, antara Pilkada Serentak 2022 atau Serentak 2024*. Diakses dari *Sikap Fraksi di DPR soal Revisi UU Pemilu, antara Pilkada 2022 atau Serentak 2024* Halaman all - Kompas.com. Pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 02.59 Wita.

Mas Alamil Huda. 2021. *185 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Sudah Dilantik*. Diakses dari *185 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Sudah Dilantik | Republika Online*. Pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 1:02 Wita.

Puspasari Setyanigrum. 2022. *Sejarah Pilkada dari 2015 hingga 2019*, Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/200758078/sejarah-pilkada-dari-2015-hingga-019?page=all#page2>. Pada tanggal 21 Juli 2023, pukul 15.30 Wita.

Saiful Anam. 2021. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. Diakses dari <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Pada tanggal 24 Januari 2024, pukul 10.38 Wita.

Utami Argawati. 2022. *Pilkada Serentak 2024 Akibatkan Masa Jabatan Kepala Daerah Berkurang*. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18612>. Pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 1:42 Wita.